

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA
DAERAH DI KOTA/KABUPATEN PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH

FAHMI RAMADANSYAH

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Belanja Daerah Di Kota/ Kabupaten Provinsi Aceh**

Oleh

Fahmi Ramadansyah

4012015168

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah
Langsa, 16 November 2022

Pembimbing I



Dr. Mulyadi, MA

NIP.197707292006041003

Pembimbing II



Mastura, M.E.I

NIDN.2013078701

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Syamsul Rizal, MSI

NIP. 197812152009121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA / KABUPATEN PROVINSI ACEH**” oleh Fahmi Ramadansyah, NIM. 4012015168. Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa Pada Tanggal 18 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 18 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



Dr. Mulyadi, MA
NIP. 19770729 200604 1 003

Penguji II



Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701

Penguji III



Dr. Syamsul Rizal, M.SI
NIP. 19781215 200912 1 002

Penguji IV



Tajul 'Ula, S.E., M.SI
NIP. 19931208 202012 1 015

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Ramadansyah

Nim : 4012015168

Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Empat, 10 Januari 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Ampera, Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Di Kota/ Kabupaten Provinsi Aceh”** benar karya asli saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ni saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 16 November 2022

Yang membuat pernyataan



Fahmi Ramadansyah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara parsial dan simultan Pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di kota/ kabupaten provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan 3 daerah dalam provinsi Aceh sebagai sampel penelitian selama periode 2016 sampai dengan 2020. Dalam menganalisa data dan menguji hipotesis penelitian, teknik yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *common effect*.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil analisa data secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) dalam penelitian ini sebesar 0.669053 yang artinya Artinya bahwa varias perubahan naik turunnya variable Y dapat dijelaskan oleh variable X1 dan X2 sebesar 66.9%, sementara sisanya 33.1% dijelaskan oleh variable- variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), Belanja daerah

ABSTRACT

This study aims to partially and simultaneously analyze the effect of local revenue (PAD) and general allocation funds (DAU) on regional expenditures in cities/districts of Aceh province. This study uses 3 regions within the province of Aceh as research samples for the period 2016 to 2020. In analyzing data and testing research hypotheses, the technique used is panel data regression with a common effect model.

The results of data analysis show that partially local revenue (PAD) has no significant effect on regional spending, while the general allocation fund (DAU) has a positive and significant effect on regional spending. The results of simultaneous data analysis show that local revenue (PAD) and general allocation funds (DAU) together have a significant effect on regional spending.

The value of the coefficient of determination (adjusted R square) in this study is 0.669053, which means that the variation of changes in the ups and downs of variable Y can be explained by variables X1 and X2 of 66.9%, while the remaining 33.1% is explained by other variables not examined in this study. .

Keywords: Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Regional Expenditure

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat beserta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan langkah untuk menuju pembuatan skripsi. Di dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa masalah yang secara langsung ingin penulis teliti dan beberapa teori sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta do'a yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Tuhan YME Karena karunianya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menulis proposal skripsi ini.
2. Kepada Kedua Orang Tua atas segala doa dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Dr. Iskandar Budiman, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Perbankan Syariah

Semoga amal perbuatan yang baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula disisi Allah SWT. Semogas kripsi ini dapat berguna dan diterima. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Langsa, 16 November 2022

Penulis

FAHMI RAMADANSYAH

NIM : 4012015168

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	9
2.2 Belanja Daerah	11
2.3 Pendapatan Asli Daerah(PAD)	14
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	17
2.5 Anggaran Belanja Dalam Ekonomi Islam.....	20
2.5.1 Dasar Hukum Anggaran Belanja Dalam Islam	20
2.5.2 Tujuan Belanja Dalam Islam	21
2.6 Hubungan Antar Variabel	23
2.7 Penelitian Terdahulu	24
2.8 Kerangka Teori.....	28

2.9 Perumusan Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data Penelitian	31
3.4 Definisi Operasional	33
3.5 Instrumen Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.6.1 Pemilihan Metode Analisa Data Panel	35
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	37
3.6.3 Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.2 Deskripsi Data Penelitian	44
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45
4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	47
4.2.3 Belanja Daerah	50
4.3 Penentuan Teknik Analisa Data Panel	53
4.3.1 Uji Chow	53
4.3.2 Uji Hausman	54
4.3.3 Uji <i>Lagrange multiplier</i> (LM Test)	55
4.4 Uji Asumsi Klasik	56
4.4.1 Uji Normalitas	56
4.4.2 Uji Multikolinieritas	57
4.4.3 Uji Heterokedastisitas	58
4.4.4 Uji autokorelasi	59
4.5 Hasil Analisis Regresi Data Panel	60
4.6 Hasil Uji Hipotesis	61
4.6.1 Uji Simultan (Uji F)	62

4.6.2 Uji Parsial (Uji T)	63
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	64
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	65
4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah	65
4.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah	66
4.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah	68
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Daerah di Kota/ Kabupaten Provinsi Aceh	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional	33
Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	45
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	47
Tabel 4.3 Data Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	47
Tabel 4.4 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	49
Tabel 4.5 Data Belanja Daerah Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	50
Tabel 4.6 Realisasi Belanja Daerah Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	52
Tabel 4.7 Uji Chow	54
Tabel 4.8 Uji Hausman	55
Tabel 4.9 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	56
Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas	58

Tabel 4.11 Uji Heterokedastistias	59
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Data Panel	60
Tabel 4.14 Hasil Uji F	62
Tabel 4.15 Hasil Uji T	63
Tabel 4.16 Hasil Uji R^2	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori	29
Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	45
Gambar 4.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	48
Gambar 4.3 Belanja Daerah Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Aceh Timur Tahun 2016-2020	51
Gambar 4.4 Uji Normalitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	v
Lampiran 1 Data Penelitian	82
Lampiran 2 Likelihood Ratio	83
Lampiran 3 Hauman Test	84
Lampiran 4 Hasil LM Test	85
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas	86
Lampiran 6 Hasil Multikolinieritas	87
Lampiran 7 Heteroskedastisitas	88
Lampiran 8 Hasil Autokorelasi	89
Lampiran 9 Hasil Uji Regresi Data Panel	90
Lampiran 10 Tabel Uji F	90
Lampiran 11 Tabel Uji T	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹ Kebijakan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan nasional, Pemerintah daerah dituntut agar lebih bisa mandiri dalam mengelola keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah.²

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya bersinergi dalam mengelola setiap sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.³ Pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan berdasarkan dengan kemampuan daerah masing-masing dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga dapat mendorong peningkatan keuangan daerah. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian

¹ Ida Bagus Gde Wirakusuma dkk, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Tabanan. Vol.13. No.1 (2016), h. 69, universitastabanan.ac.id

² Ian Dwi Heruyanto, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 22, diglib.uin-suka.ac.id

³ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 374

tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat daerah masih sangat terbatas. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya.⁴ Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah kabupaten/kota utamanya dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini memang menjadi konsekuensi logis daerah otonomi yakni pemerintah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang

⁴ Bambang Hariadi, *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang. Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 92

diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara susunan pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.⁵

Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 76

kewenangan Provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu menurut Kesit dalam Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah studi kasus diwilayah Jawa Tengah dan DIY. Hasil penelitiannya diperoleh secara empirik menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah. Dari penelitian tersebut didapat bahwa koefisien regresi DAU sebesar 0,778 dan koefisien regresi PAD sebesar 1,964 dan juga didapatkan bahwa variabel DAU

⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 76

dan PAD dapat menjelaskan sebesar 71,3% berpengaruh terhadap pengaruh belanja daerah. Data yang digunakan oleh peneliti adalah poling data dimana data yang diambil yaitu data tahun 2004-2008, dari hasil tersebut dapat dilihat variabel DAU dan PAD memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra. Pada hasil analisis di pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut berarti terjadi *Flypaper Effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah diterima. Analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Prediksi belanja daerah studi empirik di wilayah Jateng dan DIY. Hasil penelitiannya diperoleh secara empirik membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat, dan juga menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap prediksi belanja daerah.

Peneliti akan menguji kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh yang terdiri dari beberapa daerah yaitu kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan kabupaten Aceh Timur. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui variabel PAD dan variabel DAU apakah memberikan pengaruh terhadap belanja daerah dan juga ingin mengetahui kemampuan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di kota/ kabupaten Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kota/ kabupaten provinsi Aceh ?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kota/ kabupaten provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kota/ kabupaten provinsi Aceh.
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kota/ kabupaten provinsi Aceh.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah di Kota/ kabupaten provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi peneliti lain dalam bidang yang sama dimasa yang datang.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan referensi terkait dengan topik dalam penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan khususnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat kabupaten/ kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami, maka laporan penelitian ini dibagi menjadi bagian-bagian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai landasan teori dari variabel-variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, uji persyaratan analisis, uji hipotesis dan analisa pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁷ Defenisi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.⁸

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD memperhatikan adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah serta sinkronasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam perencanaan dan penganggaran negara.

Daerah memerlukan suatu instrumen kebijakan untuk menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintahan pusat. Instrumen kebijakan yang paling utama bagi daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD mempunyai peranan penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian kinerja pemerintah daerah dalam 1 (satu) periode. APBD memuat segala bentuk penerimaan dan pembiayaan daerah dalam bentuk moneter

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab 1 Pasal 1 No 50 dan 51, h. 4

⁸ *Ibid.*, Bab 1 Pasal 1 No 9, h. 2

atau Rupiah. APBD seharusnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan suatu daerah namun di sisi lain juga tidak membebani secara berlebihan daerah yang bersangkutan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.⁹

Sumber-sumber penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan di UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yaitu :
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - c. Dana Bagi Hasil
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011), h. 50

2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.¹⁰ Sedangkan Bastian menyatakan bahwa belanja daerah adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan oleh berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.¹¹

Menurut Undang-Undang 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Halim, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.¹²

Belanja daerah ada untuk melindungi dan meningkatkan prioritas-prioritas dalam lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan bentuk pelayanan masyarakat dan pengembangan jaminan sosial yang dihadirkan dalam kewajiban pemerintah daerah.. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.¹³

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

¹⁰ Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h .68

¹¹ Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM, 2003), h. 53

¹² Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke 3*, (Jakarta: Salemba Empat , 2007), h. 44

¹³ Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 65

memberikan definisi belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, pengelompokan belanja menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari :

A) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

B) Belanja Tidak Langsung

Belanja tak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka.

C) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,

penghematan belanja kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- b. Pencairan dana cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
 - d. Penerimaan pinjaman daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat, Provinsi dan atau pemerintah daerah lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:
- a. Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen non permanen. Investasi ini dapat berupa deposit berjangka, Pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat

Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/ BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

- c. Pembayaran pokok utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau pihak ketiga.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari daerah tersebut serta digunakan untuk modal awal pemerintah daerah guna membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah dalam mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.¹⁴

Pendapatan Asli daerah menurut Abdul Halim merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.¹⁵ PAD bertujuan untuk memberikan keleluasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud azas

¹⁴ Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di akses pada www.djpk.depkeu.go.id tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 10.11 WIB.

¹⁵ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.101

desentralisasi.¹⁶ APBD memuat pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri atas:¹⁷

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁸

Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Dalam hal-hal tertentu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula jenis pajak sebagai alat ukur untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

b) Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

¹⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 99

¹⁷ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 382

¹⁸ *Ibid.*, h. 383

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹ Yang menjadi obyek retribusi daerah adalah :

1. Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar dan lainnya.
 2. Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan lainnya.
 3. Retribusi perijinan tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah seperti retribusi pembentukan penggunaan tanah, retribusi izin mendirikan bangunan, dan lainnya.²⁰
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian lembaga keuangan bank dan non bank dan bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

¹⁹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 6

²⁰ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 419

- d) Pendapatan Lain-Lain yang sah, di lain pihak adalah penerimaan pemerintah daerah diluar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, sewa kios milik daerah.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang suatu sistem yang pembiayaan pemerintahannya dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan ini disebut dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Sebenarnya perolehan dana yang berasal dari bagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan itu merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut Bastian, dana alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.²¹

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dianggarkan berdasarkan atas besar kecilnya celah fiskal dan potensi daerah sehingga formulanya terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Pengiriman dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah disuatu wilayah bertujuan agar menghindar celah fiskal (*fiscal gap*) dan meratakan kesanggupan fiskal suatu wilayah guna membantu independensi

²¹ Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM, 2003), h. 84

suatu pemerintah daerah pada pelaksanaan fungsi serta haknya dalam memberikan pelayanan kepada rakyat merupakan pengertian dari dana alokasi Umum (DAU). DAU pada umumnya merupakan bagian dari dana perimbangan dari penerimaan APBN kemudian disalurkan terhadap wilayah untuk membiayai apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan desentralisasi.²²

Menurut pendapat Halim, dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²³

Dana alokasi umum memiliki pengaruh yang penting dan mengharuskan suatu wilayah untuk dapat menjadikan hasil pendapatan yang penting melalui pembiayaan yang diterima dari APBN. Maka dari itu penerimaan DAU difungsikan sebagai kontrol pemerintah terhadap pendapat daerah guna memperoleh beberapa kaitan yang lebih tinggi terhadap keuangan negara. Menurut Yani, dana alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang dimulai sejak 01 Januari

²² Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 76

²³ Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 160

²⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 110

2001 oleh karena itu pemerintah daerah mendapatkan wewenang cukup besar dan bertanggung jawab serta nyata dalam mengatur dan menata daerahnya sendiri.

Dalam menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah, dana alokasi umum perlu membagi serta melihat potensi daerah, kebutuhan pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Faktor pemerataan fiskal merupakan salah satu dari fungsi yang dimiliki oleh DAU. Faktor yang dipengaruhi terhadap banyak sedikitnya DAU terhadap setiap daerah merupakan kesenjangan fiskal dan potensi daerah. Prinsip pengalokasian dana pada DAU yaitu apabila daerah yang memiliki potensi fiskalnya cukup besar namun apa yang dibutuhkan tergolong kecil, maka akan menerima DAU yang relative rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila potensi daerah kecil, sementara yang dibutuhkan cukup besar, maka daerah tersebut akan memperoleh DAU yang relative besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Adapun literatur dalam perhitungan DAU berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan DAU sedikitnya 25% atas pemasukan negara yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU terhadap wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sesuai dengan ketentuan diatas.
3. DAU pada suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan sesuai dengan yang dikalikan dari jumlah DAU terhadap daerah kabupaten/kota yang ditetapkan pada APBN dengan jumlah didaerah kabupaten/kota terkait.

4. Jumlah daerah kabupaten/kota sesuai yang diarahkan diatas ialah porsi jumlah daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.²⁵

Setiap daerah memiliki kemampuan dalam melakukan perhitungan dana alokasi umum yang menjadi bagiannya, hal tersebut dapat mendukung penataan APBD dengan tidak menanti keluarnya keputusan presiden mengenai pengelompokan APBD. Mengacu pada PP No 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, tujuan DAU terutama adalah untuk : *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah, dan *sufficiency* merupakan kepentingan daerah dalam mencukupi *fiscal gap*. *Sufficiency* (kecukupan) dipengaruhi beberapa faktor yakni kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum (SPM).

2.5 Anggaran Belanja Dalam Ekonomi Islam

2.5.1 Dasar Hukum Anggaran Belanja dalam Islam

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, prinsip belanja dalam Islam harus sesuai dengan tuntunan. Dasar hukum anggaran belanja dalam Al-Qur'an adalah:

- a. Al-Qur'an dalam Surah: an-Nahl (16) ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (٩٠)

²⁵ Sidik, Mahi dkk, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Kompas, 2002), h. 51

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam khasanah literasi Islam sering disebut sebagai Baitu Mal. Baitul Mal adalah pos yang menyimpan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin/warga negara. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, baik diambil dari kaum muslimin dan non-muslim menjadi harta baitul mal.²⁶

Pembelanjaan dalam Islam harus ditujukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, pengeluaran haruslah ditunjukkan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros. Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapat yang berada ditangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah SWT.

2.5.2 Tujuan Belanja dalam Islam

Tujuan pembelanjaan publik dalam literatur Islam adalah:²⁷

a. Pemenuhan Kebutuhan

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk orang fakir dan miskin dan juga papan merupakan tujuan utama pembelanjaan. Disamping zakat dan ghanimah, pendapatan *fay'* juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin.

²⁶ Syahirul Alim dan Khusnudin, *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perspektif Islam (Studi Kasus APBN di Indonesia Tahun 2014)*, Artikel UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 2, No 1, 2015: El Dinar moraref.kemenag.go.id

²⁷ Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam (Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan peran bait al-mal)*, (Bandung: Nuansa, 2005), h.197

b. Pertahanan

Pertahanan nasional merupakan tugas negara yang sangat penting. Keuangan yang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan perang sejak masa awal Islam. Pendapatan dari fay, ghanimah, dan zakat juga digunakan untuk persiapan perang. Biaya pertahanan meliputi gaji dan bala bantuan kepada tentara, tanggungan, janda perang, persenjataan dan juga kuda.

c. Pelayanan Administrasi

Negara Islam memerlukan banyak uang untuk membayar gaji para pegawai dan orang-orang yang dipekerjakan dalam layanan sipil, hukum dan administrasi lainnya karena negara Islam merupakan imperium besar.

d. Keamanan Sosial

Tugas utama negara Islam adalah jaminan keamanan sosial bagi setiap warga negaranya. Keamanan sosial meliputi pemberian pensiun bagi lansia, peringanan penduduk dari hutang dan lain sebagainya.

e. Pensiunan dan Sumbangan

Salah satu tujuan utama pembelanjaan negara Islam adalah pemberian pensiunan. Sebagian besar dari keuangan neegara digunakan untuk memenuhi tujuan ini.

f. Pendidikan

Tujuan ini menjadi tujuan terpenting pembelanjaan negara. Khalifah Umar menugaskan para guru yang digaji untuk mengajarkan Al-Qur'an.

g. Tujuan Pembangunan

Berbagai proyek manfaat publik dan infrastruktur sosio-ekonomi yang dijalankan oleh negara untuk memperkuat perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, penggalian kanal, pembersihan saluran air dan proyek pembangunan lainnya.

2.6 Hubungan Antar Variabel

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Bertambahnya pendapatan yang nyata dari suatu daerah akan semakin meningkatkan belanja daerah. Tinggi tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biaya sehingga belanja daerah yang semakin banyak. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah menjadikan proporsi penerimaan dan pengeluaran mendekati ideal, artinya apabila penerimaan dapat mengalami peningkatan, tentunya berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dapat mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya.²⁸

b) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Menurut Suwandi, setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah, maka tidak jarang apabila pemerintah daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar, berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya

²⁸ Nashiri dan Amanda, *Pengaruh DAU, DBH Dan PAD Terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2018), h. 19-20

Dana alokasi umum akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan belanja daerah.²⁹ Beberapa studi sebelumnya telah menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja daerah akan semakin meningkat.³⁰

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Luthfi Ari Suhandana (2020), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. ³¹	Dependen: Belanja Daerah Independen: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Metode Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda.	Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah Aceh tahun 2010-2019.
Persamaan :		Pada variabel dependen dan metode penelitian		
Perbedaan :		Pada periode penelitian dan sampel penelitian		
2.	Siti Murohah (2019), Pengaruh	Dependen: Belanja Daerah Independen:	Metode Kuantitatif, Analisis	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah, Dana

²⁹ *Ibid.*, h. 22

³⁰ Moh. Rasyid, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal: Ekonomi Pembangunan, Vol. 6 No. 1, Januari 2018), h. 204-216

³¹ Luthfi Ari Suhandana, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. ³²	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Jumlah Penduduk	Regresi Linier Berganda.	Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
	Persamaan :	Menggunakan regresi linier berganda		
	Perbedaan :	Menggunakan 5 variabel independen, sampel dan tempat penelitian		
3.	Irfan, Risma, Salmah (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. ³³	Dependen: Belanja Daerah Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan	Metode Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda.	Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh

³² Siti Murohah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019)

³³ Irfan Risma Salmah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*, (2018)

				signifikan terhadap belanja daerah.
Persamaan :		Menggunakan regresi linier berganda		
Perbedaan :		Menggunakan 4 variabel independen, sampel dan tempat penelitian		
4.	Eka Ainingrum (2017), Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pangkep. ³⁴	Dependen: Belanja Daerah Independen: Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Metode Kuantitatif Analisis Regresi Linier Berganda.	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Pangkep.
Persamaan :		Menggunakan regresi linier berganda dan 2 variabel independen		
Perbedaan :		Sampel, periode dan tempat penelitian		
5.	Rihfenti Ernayani (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana	Dependen: Belanja Daerah Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	Metode Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil baik secara parsial maupun simultan

³⁴ Eka Ainingrum, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pangkep*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)

	Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah. ³⁵	Khusus, Dana Bagi Hasil		berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013.
Persamaan :		Menggunakan regresi linier berganda		
Perbedaan :		Menggunakan 4 variabel independen, sampel dan tempat penelitian		
6.	Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas, Ratna (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. ³⁶	Dependen: Belanja Daerah Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus	Metode Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda.	Uji parsial menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2010-2017.
Persamaan :		Menggunakan regresi linier berganda		
Perbedaan :		Menggunakan 4 variabel independen, sampel dan		

³⁵ Rihfenti Ernayani, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan, 2017)

³⁶ Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas, Ratna, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*, (Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Vol.03 No.3 Desember, 2020), E-ISSN: 2615-126X, http://ojs.unimal.ac.id/index/php/ekonomi_regional

		tempat penelitian		
7.	Evanina Sinaturi (2021), Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah. ³⁷	Dependen: Belanja Daerah Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Metode Kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda.	Secara parsial DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada wilayah provinsi Sumatera Utara. Peningkatan jumlah DAU dan PAD akan meningkatkan jumlah belanja daerah
Persamaan :		Menggunakan regresi linier berganda dan jumlah variabel independen		
Perbedaan :		Objek dan periode penelitian		

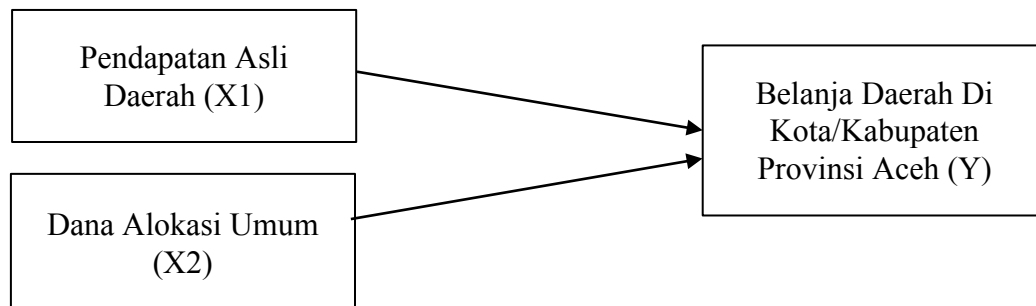
Sumber Penelitian Terdahulu

2.8 Kerangka Teori

Kerangka pemikiran teoritis ini dibuat untuk lebih memahami Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

³⁷ Evanina Sinaturi, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah*, (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Universitas Sumatera Utara, Vol. 4 No. 1 Maret 2021)

Gambar 2.1 Kerangka Teori



2.9 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang kita amati. Fungsinya untuk menguji kebenaran suatu teori.³⁸ Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka formulasi hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

H_{01} : Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

H_{a1} : Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

H_{02} : Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

³⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008), h.

H_{a2} : Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

H_{03} : Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

H_{a3} : Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis telah ditetapkan.³⁹

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur dengan mengambil data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2016 sampai 2020. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai dengan selesai.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2016 sampai 2020 yang di peroleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur. Data lain yang

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 14

digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca dan menganalisis literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Berikut data variabel penelitian yang telah diperoleh peneliti langsung dari Badan Pengelola Keuangan Daerah masing-masing Kota/Kabupaten:

Tabel 3.1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh (rupiah)

Kota/ Kabupaten	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Daerah
Aceh Tamiang	2016	138.016.249.645	542.165.803.000	1.439.423.440.417
	2017	147.425.735.124	542.165.803.000	1.357.431.568.948
	2018	141.815.373.710	532.641.693.000	1.198.668.451.708
	2019	139.671.209.191	547.975.351.000	1.376.386.856.164
	2020	126.454.878.819	497.724.291.000	1.244.197.266.585
Langsa	2016	133.420.175.265	451.951.928.000	1.109.385.442.250
	2017	127.325.504.605	444.012.586.000	952.247.062.987
	2018	125.634.683.815	444.012.586.000	582.817.105.360
	2019	153.718.784.258	456.700.561.000	887.136.927.086
	2020	159.592.856.511	416.834.350.000	813.851.403.066
Aceh Timur	2016	107.020.180.360	784.102.687.000	1.528.899.541.935
	2017	164.288.180.444	777.993.391.000	1.627.786.840.718
	2018	176.549.143.142	786.034.858.000	1.325.319.567.479
	2019	202.093.734.432	819.436.048.000	1.606.154.645.814
	2020	210.849.923.018	774.098.033.000	1.924.686.760.175

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

3.4 Definisi Operasional

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi
1.	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU No 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
2.	Dana Alokasi Umum (X2)	Dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2002)
3.	Belanja Daerah (Y)	Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (UU No 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3.5 Instrumen Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif regresi berganda.⁴⁰ Dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, mengenai variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai penentu tingkat Belanja Daerah. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 272

data dari laporan APBD tahun 2016 sampai tahun 2020 yang di publikasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah regresi. Regresi digunakan untuk menghitung kekuatan hubungan atau arah hubungan antar variable independent dan variable dependen. Dalam penelitian in, Teknik regresi yang digunakan adalah regresi data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu / objek penelitian, sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap beberapa individu/ objek penelitian. Teknik regresi data panel ini digunakan untuk melihat seberapa besar dan bagaimana pengaruh antara pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di kota/ kabupaten provinsi aceh dalam rentan waktu 2016- 2020. Teknik analisis regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software* program *Eviews 12 for MacOS*. Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + E_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Belanja Daerah

A = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2	= Dana Alokasi Umum (DAU)
i	= Wilayah
t	= Waktu
e_{it}	= <i>Error term</i> (variabel pengganggu) atau residual

3.6.1 Pemilihan Metode Analisa Data Panel

Sebelum melakukan uji asumsi klasik, perlu dilakukan pemilihan metode analisa data panel untuk mendapat metode yang tepat. Secara umum, terdapat 3 cara metode data panel yang sering digunakan yaitu:

1. *Common Effect*

Metode *Common Effect* ialah dilakukan dengan cara menggabungkan data *Time Series* dengan data *Cross Section*. Penggabungan kedua jenis data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau sering juga disebut dengan teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect*

Metode *Fixed Effect* ialah metode yang mengasumsikan bahwa individu/objek penelitian memiliki intersep yang berbeda antara objek tetapi memiliki *slope* regresi yang sama dari waktu ke waktu.

3. *Random Effect*

Metode *Random Effect* ialah metode yang menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar individu/objek penelitian. Metode ini

mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi intersep tersebut bersifat random.

Untuk memilih metode estimasi yang paling tepat, maka perlu dilakukan serangkaian uji spesifikasi model yang cepat untuk menggambarkan data.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. Uji Chow (*Likelihood Ratio*)

Uji Chow yaitu digunakan untuk memilih model estimasi data yang paling tepat diantara *common effect model* (CEM) atau *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila hasil uji Chow menunjukkan probabilitas $F > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Namun, apabila hasil uji menunjukkan probabilitas $F < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman yaitu dilakukan untuk memilih model estimasi data yang paling tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random effect model}$$

$$H_1 = \text{fixed effect model}$$

Apabila hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas *chi-square* $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random effect model*. Namun, apabila hasil Uji

Hausman menunjukkan probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

3. Uji *Lagrange Multiplier* (*LM Test*)

Uji *Lagrange Multiplier* ialah dilakukan untuk memilih model estimasi data yang paling tepat antara *common effect model* atau *random effect model*. Uji ini dilakukan apabila hasil yang didapat dari Uji Chow dan Uji Hausman bukanlah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis dalam Uji *Lagrange Multiplier* adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common effect model}$$

$$H_1 = \text{Random effect model}$$

Apabila hasil Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan probabilitas *P-Value* $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Namun, apabila hasil Uji *Lagrange Multiplier* menunjukkan probabilitas *P-Value* $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random effect model*.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi syarat ketentuan model regresi, yang meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka digunakan uji statistik parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji

statistik non parametrik. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Pengambilan keputusannya digunakan pedoman jika nilai Sig.<0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai Sig.>0,05 maka data berdistribusi normal.⁴¹

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas VIF adalah 10. VIF merupakan suatu estimasi berapa besar multikolinieritas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas. Jika nilai VIF < 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai VIF > 10 maka telah terjadi multikolinearitas pada model regresi.⁴²

3.6.2.3 Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas apakah model yang dibangun memiliki unsur bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ke kebanyakan data cross-section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini

⁴¹ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 153

⁴² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 91

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Sedangkan metode statistic dapat dilakukan dengan Uji breuch-Pagan LM.

Kriteria pengujian heteroskedastisitas adalah:

1. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $> 0,05$ berarti tidak terdapat masalah heterokedastisitas.
2. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi $< 0,05$ berarti terdapat masalah heterokedastisitas.

3.6.2.4 Autokorelasi

Uji autokorelasi ialah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode waktu (t) dengan kesalahan pada periode waktu sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Masalah autokorelasi biasanya terjadi jika data penelitian menggunakan data *time series*. Untuk mengetahui adanya masalah autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistik Durbin-Watson.⁴³ Autokorelasi dapat dideteksi dengan membandingkan antara DW hitung dengan DW tabel dengan Kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai DW hitung < -2 , maka model regresi terdapat masalah autokorelasi positif.
2. Jika nilai DW hitung terletak diantara angka -2 sampai dengan +2, maka model regresi terbebas dari masalah autokorelasi.
3. Jika nilai DW hitung $> +2$, maka model regresi terdapat masalah autokorelasi negatif.

⁴³ Ghozali dan Ratmono, *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10*, h.173

3.6.3 Uji Hipotesis

Analisis regresi melalui uji t maupun uji F digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Tujuan digunakan analisis regresi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan, serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan.

3.6.3.1 Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui keterandalan serta kemaknaan dari nilai koefisien regresi, sehingga dapat diketahui apakah pengaruh variabel PAD (X_1), DAU (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y). Jika nilai signifikan $\alpha < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi $\alpha > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.⁴⁴

3.6.3.2 Uji F (Uji Simultan)

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara variabel PAD (X_1), DAU (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y). Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi dari hipotesis :

1. H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara variabel PAD (X_1), DAU (X_2), terhadap belanja daerah (Y).

⁴⁴ V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 155

2. H_a = Terdapat pengaruh antara variabel variabel PAD (X_1), DAU (X_2), terhadap belanja daerah (Y).

Uji ini dilakukan dengan syarat :

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi 0,05 dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikasnsi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.⁴⁵

3.6.3.3 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependennya (*goodness of fit test*). Nilai R^2 dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

R^2 = Nilai berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu berarti

⁴⁵ *Ibid.*, h. 156

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁴⁶

⁴⁶ Gujarati dan Porter, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 19

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Daerah Aceh memiliki luas wilayah sebesar 57.956 km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 tercatat mencapai 5.371.532 jiwa yang dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Aceh juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa yang diberikan kewenangan otonomi khusus. Provinsi Aceh memiliki 18 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 289 Kecamatan. Dalam penelitian, penulis mengambil 3 Kota/Kabupaten Provinsi Aceh yakni Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur.

Tempat penelitian yang pertama adalah kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Tamiang terletak antara 03°53'18,81"-04°32'56,76" Lintang Utara dan 97°43'41,51"-98°14'45,41" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20-700 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2007, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12 kecamatan dan 213 kampung. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas meski jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara dan juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengandalkan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Tempat penelitian kedua adalah kota Langsa. kota Langsa adalah bagian dari kabupaten Aceh Timur. Kemudian sesuai dengan perkembangan provinsi

Aceh baik dari segi budaya, politik dan ekonomi, provinsi ini dituntut mengembangkan diri khususnya dari segi pemerintahan sehingga pada tahun 2001 terbentuklah Kota Langsa yang merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Timur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi NAD. Banyak potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kota Langsa diantaranya lahan sawah yang telah diusahakan oleh masyarakat, selain itu ada beberapa potensi yang juga bisa dikembangkan untuk memajukan Kota Langsa seperti sektor pendidikan, perdagangan dan jasa.

Tempat penelitian yang ketiga adalah kabupaten Aceh Timur. Secara geografis Aceh Timur berada pada koordinat 4°09'21,08"-5°06'02,16" Lintang Utara dan 97°15'22,07"-97°34'47,22" Bujur Timur. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Sejak tahun 2000 daerah Aceh Timur mengalami pembagian yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini tersedia pelabuhan industri yaitu pelabuhan Idi.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga data yaitu Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat pada tabel berikut ini:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan otonomi daerah. Provinsi Aceh sudah ada PAD sejak tahun 1994 sampai sekarang. Adanya PAD ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang dan membentuk suatu wilayah dalam menjalani otonomi daerah berdasarkan dengan kemampuan wilayah dalam mewujudkan desentralisasi.

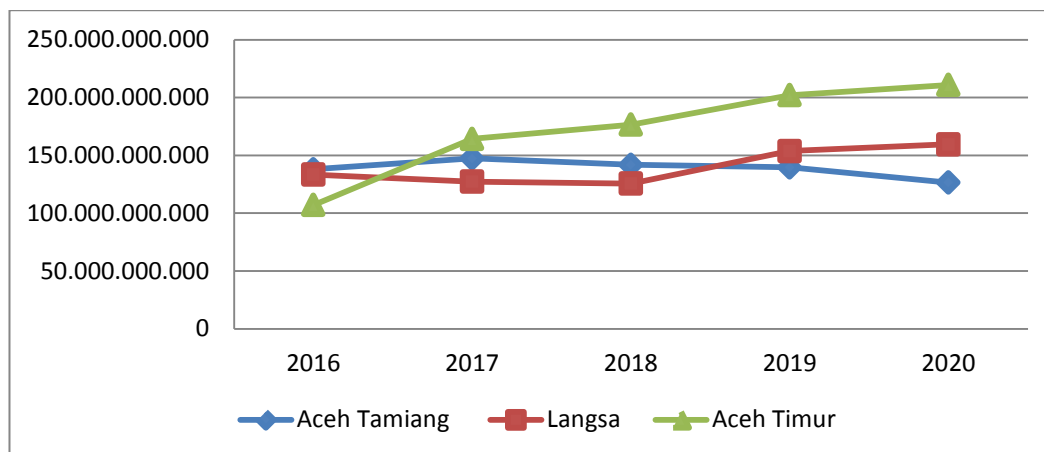
Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020 (rupiah)

Tahun	Aceh Tamiang	Langsa	Aceh Timur
2016	138.016.249.645	133.420.175.265	107.020.180.360
2017	147.425.735.124	127.325.504.605	164.288.180.444
2018	141.815.373.710	125.634.683.815	176.549.143.142
2019	139.671.209.191	153.718.784.258	202.093.734.432
2020	126.454.878.819	159.592.856.511	210.849.923.018

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Aceh jika dilihat dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020



Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Realisasi PAD Aceh Tamiang tahun 2016 mencapai Rp 114,05 milyar. Tahun berikutnya meningkat menjadi Rp 116,23 milyar. Tahun 2018 melonjak drastis yaitu sebesar Rp 139,26 milyar ini karena upaya pemerintah Aceh Tamiang dalam memungut pajak dan retribusi daerah serta menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang bisa untuk dikembangkan. Tahun 2019 dan 2020 tercatat PAD Aceh Tamiang mengalami penurunan Rp 128,90 milyar dan Rp 125,63 milyar.

Untuk Kota Langsa tidak jauh berbeda dengan Aceh Tamiang dari tahun 2016-2020 jumlah realisasi PAD mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2016 realisasi PAD Kota Langsa sebesar Rp 121,36 milyar. Namun pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 120,13 milyar. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 121,31 milyar realisasi sebesar 96,56% dari anggaran dan PAD. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 115,24 milyar. Dan tahun 2020 meningkat menjadi Rp 126,27 milyar.

Perkembangan PAD Aceh Timur selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 realisasi sebesar Rp 94,3 milyar. Tahun berikutnya melonjak drastis menjadi Rp 158,49 milyar. Hingga tahun berikutnya terus naik sebesar Rp 169,45 milyar dan Rp 185,14 milyar. Hingga tahun 2020 PAD Aceh Timur meningkat sebesar Rp 198,20 milyar. Realisasi PAD tiap Kota/Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020 (rupiah)

Kota/ Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen
Aceh Tamiang	2016	138.016.249.645	114.051.092.363	82,64%
	2017	147.425.735.124	116.246.212.753	78,85%
	2018	141.815.373.710	139.261.841.911	98,20%
	2019	139.671.209.191	128.905.940324	92,29%
	2020	126.454.878.819	125.638.090.728	99,35%
Langsa	2016	133.420.175.265	121.369.467.375	90,97%
	2017	127.325.504.605	120.138.956.032	94,36%
	2018	125.634.683.815	121.316.713.328	96,56%
	2019	153.718.784.258	115.244.246.710	74,97%
	2020	159.592.856.511	126.277.867.970	79,13%
Aceh Timur	2016	107.020.180.360	94.337.443.632	88,15%
	2017	164.288.180.444	158.492.371.449	96,47%
	2018	176.549.143.142	169.455.978.926	95,98%
	2019	202.093.734.432	185.148.022.039	91,61%
	2020	210.849.923.018	198.202.802.576	94,00%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

4.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dianggarkan dengan tujuan pemerataan keuangan terhadap daerah yang memiliki fiscal rendah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Maka adanya DAU ini pemerintah daerah bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Tabel 4.3 Data Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020 (rupiah)

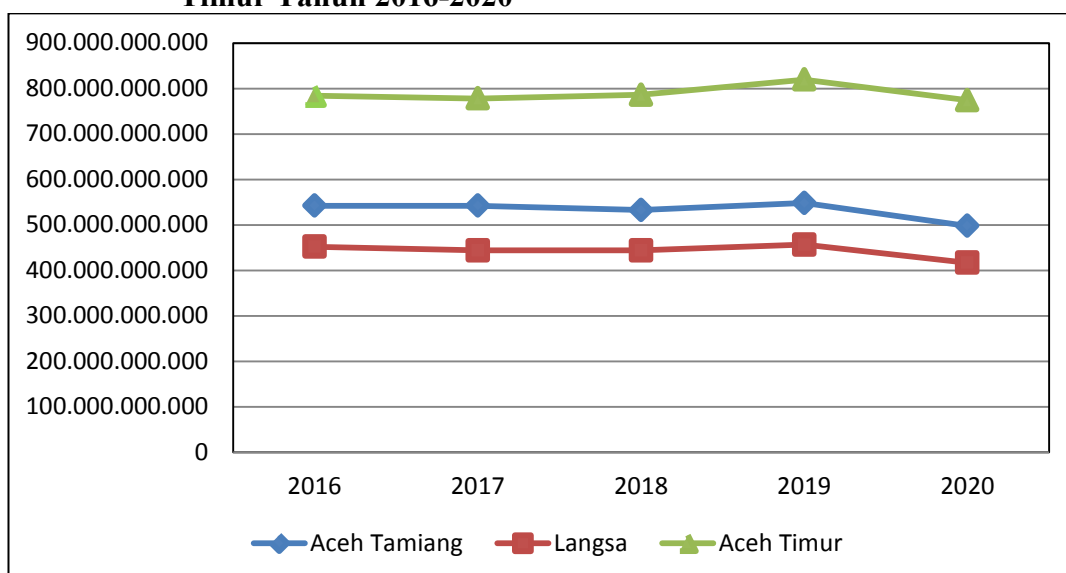
Tahun	Aceh Tamiang	Langsa	Aceh Timur
2016	542.165.803.000	451.951.928.000	784.102.687.000
2017	542.165.803.000	444.012.586.000	777.993.391.000

2018	532.641.693.000	444.012.586.000	786.034.858.000
2019	547.975.351.000	456.700.561.000	819.436.048.000
2020	497.724.291.000	416.834.350.000	774.098.033.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

Jumlah Dana Alokasi Umum Kota/Kabupaten Provinsi Aceh jika dilihat dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.2 Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020



Perkembangan Dana Alokasi Umum Kota/Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Realisasi DAU Aceh Tamiang tahun 2016 mencapai Rp 542,16 milyar. Tahun berikutnya yaitu 2017 dan 2018 menurun menjadi Rp 532,64 milyar. Tahun 2019 melonjak yaitu sebesar Rp 547,97 milyar. Dan di tahun 2020 tercatat DAU Aceh Tamiang mengalami penurunan sebesar Rp 493,79 milyar.

Untuk Kota Langsa tidak jauh berbeda dengan Aceh Tamiang dari tahun 2016-2020 jumlah realisasi DAU mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun

2016 realisasi DAU Kota Langsa sebesar Rp 451,95 milyar. Namun pada tahun 2017 dan 2018 menurun menjadi Rp 444,01 milyar dengan realisasi sebesar 100% dari anggaran DAU. Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 456,70 milyar. Dan tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp 414,45 milyar.

Perkembangan DAU Aceh Timur selama 5 tahun terakhir juga mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2016 realisasi sebesar Rp 784,10 milyar. Tahun berikutnya menurun menjadi Rp 777,99 milyar. Realisasi DAU tahun 2016 dan 2017 sebesar 100% dari anggaran. Di tahun 2018 dan 2019 naik masing-masing sebesar Rp 785,90 milyar dan Rp 819,43 milyar. Namun pada tahun 2020 realisasi DAU Aceh Timur kembali menurun menjadi Rp 769,03 milyar. Realisasi DAU tiap Kota/Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020 (rupiah)

Kota/ Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen
Aceh Tamiang	2016	542.165.803.000	542.165.803.000	100,00%
	2017	542.165.803.000	532.641.693.000	98,24%
	2018	532.641.693.000	532.641.693.000	100,00%
	2019	547.975.351.000	547.975.351.000	100,00%
	2020	497.724.291.000	493.792.581.000	99,21%
Langsa	2016	451.951.928.000	451.951.928.000	100,00%
	2017	444.012.586.000	444.012.586.000	100,00%
	2018	444.012.586.000	444.012.586.000	100,00%
	2019	456.700.561.000	456.700.561.000	100,00%
	2020	416.834.350.000	414.459.534.000	99,43%
Aceh Timur	2016	784.102.687.000	784.102.687.000	100,00%
	2017	777.993.391.000	777.993.391.000	100,00%
	2018	786.034.858.000	785.902.550.587	99,98%
	2019	819.436.048.000	819.436.048.000	100,00%
	2020	774.098.033.000	769.038.917.000	99,35%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

4.2.3 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang merupakan kewajiban tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterahkan masyarakat, semakin banyak pendapatan yang mampu diperoleh suatu daerah maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya.

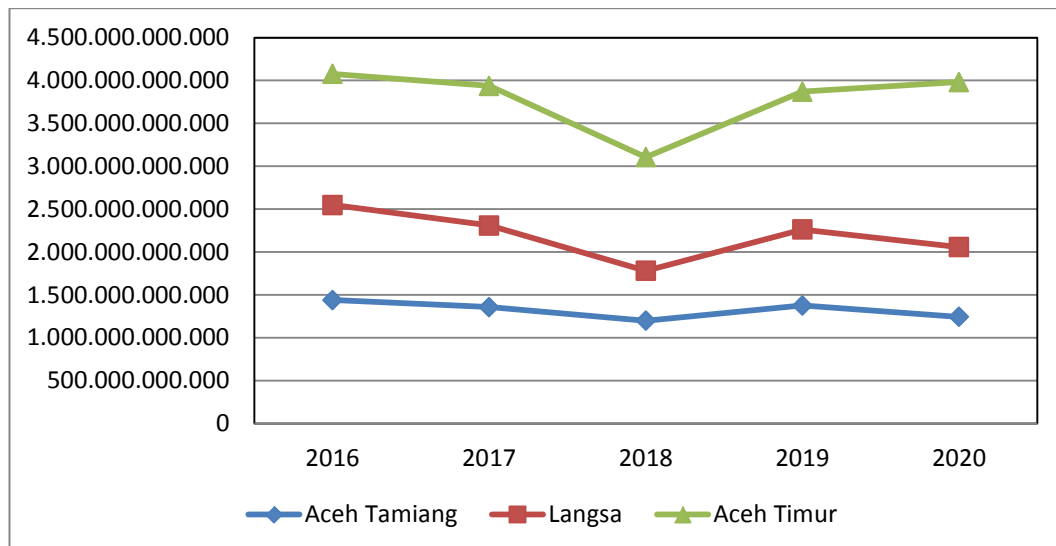
Tabel 4.5 Data Belanja Daerah Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020 (rupiah)

Tahun	Aceh Tamiang	Langsa	Aceh Timur
2016	1.439.423.440.417	1.109.385.442.250	1.528.899.541.935
2017	1.357.431.568.948	952.247.062.987	1.627.786.840.718
2018	1.198.668.451.708	582.817.105.360	1.325.319.567.479
2019	1.376.386.856.164	887.136.927.086	1.606.154.645.814
2020	1.244.197.266.585	813.851.403.066	1.924.686.760.175

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

Jumlah Belanja Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Aceh jika dilihat dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.3 Belanja Daerah Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020



Perkembangan Belanja Daerah Kota/Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Realisasi Belanja Daerah Aceh Tamiang tahun 2016 dan 2017 mencapai Rp 1,28 triliun. Tahun berikutnya menurun menjadi Rp 1,12 triliun. Pada tahun 2019 meningkat yaitu sebesar Rp 1,31 triliun. Dan tahun 2020 tercatat Belanja Daerah Aceh Tamiang mengalami penurunan menjadi Rp 1,19 triliun.

Untuk Kota Langsa tidak jauh berbeda dengan Aceh Tamiang dari tahun 2016-2020 jumlah realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan dan kenaikan. Tahun 2016 realisasi Belanja Daerah Kota Langsa sebesar Rp 998,27 milyar. Namun pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 918,45 milyar dengan realisasi sebesar 96,4% dari anggaran. Tahun berikutnya turun drastis menjadi Rp 689,73 milyar realisasi sebesar 118,3% dari anggaran. Tahun 2019 naik sebesar Rp 822,13 milyar. Dan tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp 754,37 milyar.

Perkembangan Belanja Daerah Aceh Timur selama 5 tahun juga berfluktuasi. Tahun 2016 realisasi sebesar Rp 1,37 triliun. Tahun berikutnya melonjak menjadi Rp 1,50 triliun. Hingga tahun berikutnya menurun sebesar Rp 1,16 triliun. Dan hingga tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 1,49 triliun dan Rp 1,79 triliun.

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum konsisten dalam melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat melalui realisasi anggaran belanja daerah sesuai dengan esensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Naik turunnya angka belanja daerah ini dapat disebabkan karena kurangnya atau lambatnya pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik yang tercermin dalam sarana prasarana dan infrastruktur yang dialokasikan dalam belanja daerah. Kemampuan keuangan tiap daerah berbeda-beda dalam pengelolaan pendapatannya dan dalam pendanaan kegiatan sehari-hari.⁴⁷ Realisasi Belanja Daerah tiap Kota/Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Realisasi Belanja Daerah Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur Tahun 2016-2020 (rupiah)

Kota/ Kabupaten	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen
Aceh Tamiang	2016	1.439.423.440.417	1.288.839.478.500	89,54%
	2017	1.357.431.568.948	1.286.052.897.602	94,74%
	2018	1.198.668.451.708	1.124.418.267.064	93,81%
	2019	1.376.386.856.164	1.312.594.266.235	95,37%
	2020	1.244.197.266.585	1.193.037.028.709	95,89%
Langsa	2016	1.109.385.442.250	998.271.053.424	89,98%
	2017	952.247.062.987	918.455.638.870	96,45%
	2018	582.817.105.360	689.735.498.604	118,35%

⁴⁷ Cindy Tania Damanik, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten Sumatera Utara*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Medan, 2021), h. 7

	2019	887.136.927.086	822.133.878.343	92,67%
	2020	813.851.403.066	754.374.876.443	92,69%
Aceh Timur	2016	1.528.899.541.935	1.375.682.651.145	89,98%
	2017	1.627.786.840.718	1.509.261.355.232	92,72%
	2018	1.325.319.567.479	1.165.691.763.553	87,96%
	2019	1.606.154.645.814	1.498.767.676.274	93,31%
	2020	1.924.686.760.175	1.790.134.671.474	93,01%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur, 2022

4.3 Penentuan Teknik Analisa Model Data Panel

4.3.1 Uji Chow

Sebelum melakukan Hausman test, maka terlebih dahulu melakukan uji Chow menentukan model *fixed effect* atau *common effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{common effect}$$

$$H_1 = \text{fixed effect}$$

Model terbaik dipilih berdasarkan nilai p dari Uji-F (Cross-Section F). Jika probabilitasnya lebih besar dari 0.05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Namun jika probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Tabel 4.7**Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.621363	(2,10)	0.0656
Cross-section Chi-square	8.172079	2	0.0168

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil pengujian Chow, diperoleh nilai probabilitas cross-section F 0.0656 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang artinya H_0 diterima. Maka model terbaik yang dipilih adalah *common effect model*.

4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman yaitu dilakukan untuk memilih model estimasi data yang paling tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random effect model}$$

$$H_1 = \text{fixed effect model}$$

Apabila hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas *chi-square* > 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random effect model*. Namun, apabila hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas *Chi-Square* < 0,05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

Tabel 4.8

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.242725	2	0.0267

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	2.114454	1.020751	0.179717	0.0099
X2	0.795279	1.782799	8.669323	0.7373

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil pengujian Hausman, diperoleh nilai probabilitas 0.0267 dimana nilai tersebut lebih kecil 0.05 yang artinya H_0 ditolak. Maka model terbaik yang dipilih adalah *fixed effect*.

4.3.3 Uji Lagrange multiplier (LM Test)

Uji *lagrange multiplier* merupakan suatu uji yang dilakukan untuk memilih model terbaik antara *common effect* atau *random effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect}$$

$$H_1 = \text{Random Effect}$$

Model terbaik dipilih berdasarkan nilai probabilitas Breusch-Pagan dimana jika probabilitasnya lebih besar dari 0.05 maka model yang diterima

adalah *common effect*. Namun, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 maka model yang diterima adalah *random effect*.

Tabel 4.9

Uji Lagrange multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.878308 (0.1705)	0.108140 (0.7423)	1.986448 (0.1587)
Honda	1.370514 (0.0853)	0.328846 (0.3711)	1.201629 (0.1148)
King-Wu	1.370514 (0.0853)	0.328846 (0.3711)	1.308879 (0.0953)
Standardized Honda	3.167559 (0.0008)	0.559533 (0.2879)	-0.554800 (0.7105)
Standardized King-Wu	3.167559 (0.0008)	0.559533 (0.2879)	-0.206464 (0.5818)
Gourieroux, et al.	--	--	1.986448 (0.1720)

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan adalah 0.1705 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang artinya H_0 diterima. Maka model terbaik yang dipilih adalah *common effect*.

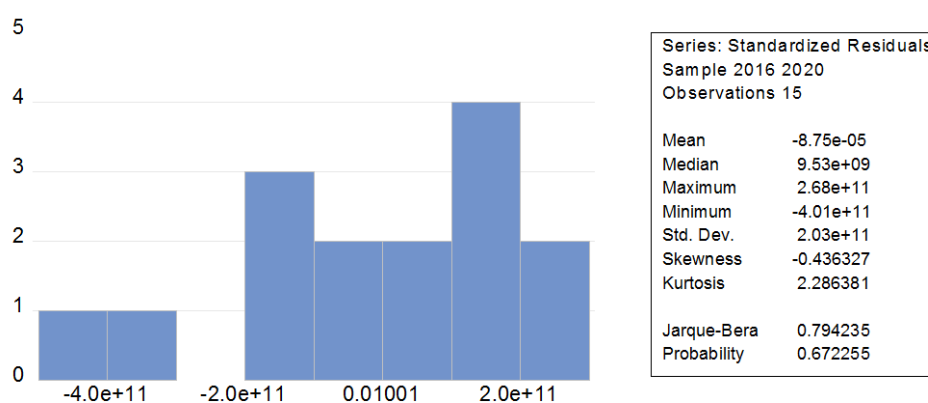
4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan guna menguji apakah dalam model regresi, baik variabel independen maupun variabel dependen terdistribusi secara normal

atau tidak. Untuk mendeteksi kenormalan data, maka dapat dilihat melalui tes Jarque-Bera (J-B test). Suatu data dapat dikatakan normal apabila probabilitas dari J-B test lebih besar dari 0.05.

Gambar 4.4
Uji Normalitas



Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan output uji normalitas tersebut, terlihat bahwa nilai statistik J-B test adalah 0.794235 dan nilai probabilitasnya adalah 0.672255 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Artinya data penelitian terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.4.2 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau koreksi antar variabel independen yang digunakan. Suatu data dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai korelasi setiap variabel independennya lebih kecil dari 0.8.

Tabel 4.10**Uji Multikolinieritas**

	X1	X2
X1	1.000000	0.546351
X2	0.546351	1.000000

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOS, 2022

Berdasarkan uji multikolinieritas tersebut, terlihat bahwa semua nilai korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.8. Artinya, model regresi yang terbentuk terbebas dari asumsi multikolinieritas.

4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, mendeteksi heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Breuch-Pagan-godfrey. Suatu data dikatakan terbebas dari heterokedastisitas (homokedastisitas) jika nilai probabilitas *Chi. Square* lebih besar dari 0.05.

Tabel 4.11

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.126844	Prob. F(2,12)	0.8820
Obs*R-squared	0.310544	Prob. Chi-Square(2)	0.8562
Scaled explained SS	0.127833	Prob. Chi-Square(2)	0.9381

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 08/11/22 Time: 14:25
Sample: 1 15
Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.03E+22	7.05E+22	0.288631	0.7778
X1	2.64E+11	5.37E+11	0.491342	0.6320
X2	-3.66E+10	1.01E+11	-0.361223	0.7242

R-squared	0.020703	Mean dependent var	3.85E+22
Adjusted R-squared	-0.142513	S.D. dependent var	4.52E+22
S.E. of regression	4.84E+22	Akaike info criterion	107.4803
Sum squared resid	2.81E+46	Schwarz criterion	107.6219
Log likelihood	-803.1022	Hannan-Quinn criter.	107.4788
F-statistic	0.126844	Durbin-Watson stat	2.588551
Prob(F-statistic)	0.882037		

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas tabel 4.8 dengan uji breuch-Pagan-Godfrey sebesar 0.8562, sesuai kriteria nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heterokedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terdapat hubungan antara kesalahan pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W). Jika nilai D-W berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

Tabel 4.12**Uji autokorelasi**

F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250
Prob(F-statistic)	0.001314		

Sumber data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai D-W sebesar 1.139250. sesuai kriteria yang menyatakan bahwa jika nilai D-W berada diantara -2 sampai dengan 2= atau $-2 < 1.040696 < 2=$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi autokorelasi.

4.5 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisa ini bertujuan untuk melihat bagaimana arah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen. Jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Hasil regresi data panel menggunakan model *common effect* adalah sebagai berikut

Tabel 4.13**Hasil Uji Regresi data panel**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 08/11/22 Time: 11:19				
Sample: 2016 2020				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 3				
Total panel (balanced) observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.36E+10	3.20E+11	0.198684	0.8458
X1	1.020751	2.439327	0.418456	0.6830
X2	1.782799	0.459276	3.881760	0.0022
R-squared	0.669053	Mean dependent var	1.26E+12	
Adjusted R-squared	0.613895	S.D. dependent var	3.53E+11	
S.E. of regression	2.19E+11	Akaike info criterion	55.24363	
Sum squared resid	5.78E+23	Schwarz criterion	55.38524	
Log likelihood	-411.3272	Hannan-Quinn criter.	55.24212	
F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250	
Prob(F-statistic)	0.001314			

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Dari output di atas didapatkan model persamaan regresi berikut:

$$Y = 6,355 + 1,021X_1 + 1,783X_2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi data panel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 1,021 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai kaitan/hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian bila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,021 juta rupiah.
2. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 1,783 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai kaitan/hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian bila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,783 juta rupiah.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

Analisis regresi melalui uji t maupun uji F digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan serta mengetahui besarnya dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

4.6.1 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh semua variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap variabel dependen yang terdiri belanja daerah. Kriteria pengujian simultan yaitu jika probabilitasnya F statistik lebih kecil dari 0.05 atau F-statistik lebih besar dari F tabel maka H_5 diterima, namun jika probabilitas F statistik lebih besar dari 0.05 atau t-tabel lebih besar dari t-statistik, maka H_0 diterima. Nilai F-tabel pada penelitian ini adalah sebesar 3.8055653, dimana $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$, dan $df_2 = n-k = 15 - 2 =$

Tabel 4.14
Hasil Uji F

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.36E+10	3.20E+11	0.198684	0.8458
X1	1.020751	2.439327	0.418456	0.6830
X2	1.782799	0.459276	3.881760	0.0022
R-squared	0.669053	Mean dependent var	1.26E+12	
Adjusted R-squared	0.613895	S.D. dependent var	3.53E+11	
S.E. of regression	2.19E+11	Akaike info criterion	55.24363	
Sum squared resid	5.78E+23	Schwarz criterion	55.38524	
Log likelihood	-411.3272	Hannan-Quinn criter.	55.24212	
F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250	
Prob(F-statistic)	0.001314			

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.14, terlihat bahwa hasil probabilitas F statistic sebesar 0.001314 yang berarti lebih kecil 0.05. dengan mencari pada tabel F, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3.8055653 sedangkan F-statistik sebesar 12.12979 yang artinya lebih besar dari F-tabel. Jadi dapat

disimpulkan bahwa pada uji simultan H_5 diterima yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga belanja daerah

4.6.2 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, pengujian hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah, pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 atau t-statistik > t-tabel. Nilai t tabel pada penelitian ini adalah 2.16037, dimana $df = n - k = 15 - 2 = 13$ dan nilai signifikan 5%.

Tabel 4.15
Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/12/22 Time: 03:56
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.36E+10	3.20E+11	0.198684	0.8458
X1	1.020751	2.439327	0.418456	0.6830
X2	1.782799	0.459276	3.881760	0.0022
R-squared	0.669053	Mean dependent var	1.26E+12	
Adjusted R-squared	0.613895	S.D. dependent var	3.53E+11	
S.E. of regression	2.19E+11	Akaike info criterion	55.24363	
Sum squared resid	5.78E+23	Schwarz criterion	55.38524	
Log likelihood	-411.3272	Hannan-Quinn criter.	55.24212	
F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250	
Prob(F-statistic)	0.001314			

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan hasil uji parsial pada table 4.15, terlihat bahwa:

1. Variable X1

$$0.418456 < 2.16037$$

$$0.6830 > 0.05$$

Artinya Variabel X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y

2. Variable X2

$$3.881760 > 2.16037$$

$$0.0022 < 0.05$$

Artinya Variabel X2 memiliki pengaruh terhadap Y

4.6.3 Uji R² Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variable bebas mempengaruhi variable terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variable independent dalam menjelaskan variable dependen.

- Nilai R-square harus berkisar 0 – 1
- Jika nilai R-square = 1 berarti naik turunnya terikat 100% dipengaruhi oleh variable bebas.
- Jika nilai R-square = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variable independent terhadap variable dependen.

Tabel 4.16
Hasil Uji R²

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/12/22 Time: 03:56
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.36E+10	3.20E+11	0.198684	0.8458
X1	1.020751	2.439327	0.418456	0.6830
X2	1.782799	0.459276	3.881760	0.0022
R-squared	0.669053	Mean dependent var	1.26E+12	
Adjusted R-squared	0.613895	S.D. dependent var	3.53E+11	
S.E. of regression	2.19E+11	Akaike info criterion	55.24363	
Sum squared resid	5.78E+23	Schwarz criterion	55.38524	
Log likelihood	-411.3272	Hannan-Quinn criter.	55.24212	
F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250	
Prob(F-statistic)	0.001314			

Sumber: data sekunder diolah eview 12 for macOs, 2022

Berdasarkan table tersebut menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0.669053. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya variable Y dapat dijelaskan oleh variable X1 dan X2 sebesar 66.9%, sementara sisanya 33.1% dijelaskan oleh variable- variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016-2020. Dapat dilihat melalui nilai probabilitas variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,6830 lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0.418456 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1.771.

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dikarenakan adanya sumber-sumber keuangan lain. Sumber-sumber keuangan daerah juga berasal dari dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸ Keberhasilan PAD hendaknya tidak diukur dari jumlah yang diterima tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.⁴⁹

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentayani (2013) Rahayu Mahardika (2017) dan Wandira (2018) bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

4.7.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur tahun 2016-2020. Dapat dilihat melalui nilai probabilitas pada variabel X2 sebesar 0,0022 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,881760 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,771.

⁴⁸ Miska Firdaus, *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 6

⁴⁹ Putri Faradila, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perekonomian Wilayah Bagian Aceh Timur (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang*, (Tesis: Universitas Sumatera Utara Medan, 2013), h.1

Kondisi ini dapat memperlihatkan apabila Dana Alokasi Umum semakin besar atau mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi peningkatan belanja daerah. Transfer yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Provinsi Aceh cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan dan memberi pelayanan publik atau pelayanan lainnya yang cukup baik. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah lebih mengusahakan penerimaan dana alokasi umum yang lebih banyak daripada melakukan peningkatan pada pemasukan dari wilayahnya yang bisa berakibat pada pengurangan dana alokasi umum.⁵⁰

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Rihfenti (2017), Luthfi Ari Suhandana (2020) dan Siti Murohah (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.⁵¹

⁵⁰ Nashiri & Amanah, *Pengaruh DAU, DBH dan PAD Terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2018, h. 19-21

⁵¹ Siti Murohah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019), h. 86

4.7.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Secara simultan hasil uji F variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,001314 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka semakin besar juga dana yang akan disalurkan untuk belanja daerah.

Peran pendapatan asli daerah dapat dikatakan lebih besar pengaruhnya dikarenakan pendapatan asli daerah akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk meningkatkan belanja daerahnya. Dana alokasi umum juga bagian dari poin pendanaan terhadap belanja daerah yang bertujuan pemberian pelayanan publik yang berkualitas terhadap rakyat baik secara langsung ataupun tidak. Yang membedakan antara PAD dan DAU ialah jika PAD bersumber melalui penghasilan yang di dapat dari wilayah tersebut, kemudian DAU bersumber melalui kiriman pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Pemerintah Kota/Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur telah berupaya terus-menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi kota, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Ainingrum (2017), Luthfi Ari Suhandana (2020) dan Evanina Sinaturi (2021) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU secara simultan dapat meningkatkan belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi 0,6830 dan t hitung 0,418456.
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi 0,0022 dan t hitung 3,881760.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh dengan nilai signifikansi 0,001314 dan t hitung 12.12979.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain:

1. Pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah dalam penciptaan kemandirian daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan penambahan indikator-indikator lainnya dengan periode penelitian

yang lebih update sehingga hasil kesimpulan yang diperoleh dapat memperkuat teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ida Bagus Gede Wirakusuma dkk, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Universitas Tabanan. Vol.13. No.1 (2016).
- Ian Dwi Heruyanto, *Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), diglib.uin-suka.ac.id
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015),
- Bambang Hariadi, *Akuntansi Manajemen Suatu Sudut Pandang. Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPF, 2002),
- Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009),
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab 1 Pasal 1 No 50 dan 51,
- Rahardjo Adisasmita , *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2011).
- Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002),
- Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi UGM, 2003).

- Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Abdul Halim, Muhammad SyamKusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).
- Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011).
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011).
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2005).
- Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: SalembaEmpat, 2011).
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Sidik, Mahi dkk, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah* , (Jakarta: Kompas, 2002).
- Syahirul Alim dan Khusnudin, *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perspektif Islam (Studi Kasus APBN di Indonesia Tahun 2014)*, Artikel UIN Maulana Malik Ibrahim, Vol. 2, No 1 , 2015: El Dinar moraref.kemenag.go.id
- Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam (Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan peran bait al-mal)*, (Bandung: Nuansa, 2005)
- Nashiri dan Amanda, *Pengaruh DAU, DBH Dan PAD Terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2018).

Moh. Rasyid, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah*, (Jurnal: Ekonomi Pembangunan, Vol. 6 No. 1, Januari 2018).

Luthfi Ari Suhandana, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Siti Murohah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019)

Irfan Risma Salmah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah*, (2018)

Eka Ainingrum, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Pangkep*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)

Rihfenti Ernayani, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan, 2017)

Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas, Ratna, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh*, (Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Malikussaleh, Vol.03 No.3 Desember, 2020), E-ISSN: 2615-126X,
http://ojs.unimal.ac.id/index/php/ekonomi_regional

Evanina Sinaturi, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah*, (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan Universitas Sumatera Utara, Vol. 4 No. 1 Maret 2021)

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT.BumiAksara, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2014).

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006)

Ghozali dan Ratmono, *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10*”.

V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Gujarati dan Porter, *Dasar-dasar Ekonometrika*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

Cindy Tania Damanik, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan*

Anggaran terhadap Belanja Modal Pada Kota/ Kabupaten Sumatera Utara,
(Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Medan, 2021).

Miska Firdaus, *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh,* (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Putri Faradila, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perekonomian Wilayah Bagian Aceh Timur (Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang,* (Tesis: Universitas Sumatera Utara Medan, 2013).

Nashiri & Amanah, *Pengaruh DAU, DBH dan PAD Terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect,* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2018.

Siti Murohah, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah,* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2019).

www.djpk.depkeu.go.id

LAMPIRAN 1

DATA PENELITIAN

Kota/ Kabupaten	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Daerah
Aceh Tamiang	2016	138.016.249.645	542.165.803.000	1.439.423.440.417
	2017	147.425.735.124	542.165.803.000	1.357.431.568.948
	2018	141.815.373.710	532.641.693.000	1.198.668.451.708
	2019	139.671.209.191	547.975.351.000	1.376.386.856.164
	2020	126.454.878.819	497.724.291.000	1.244.197.266.585
Langsa	2016	133.420.175.265	451.951.928.000	1.109.385.442.250
	2017	127.325.504.605	444.012.586.000	952.247.062.987
	2018	125.634.683.815	444.012.586.000	582.817.105.360
	2019	153.718.784.258	456.700.561.000	887.136.927.086
	2020	159.592.856.511	416.834.350.000	813.851.403.066
Aceh Timur	2016	107.020.180.360	784.102.687.000	1.528.899.541.935
	2017	164.288.180.444	777.993.391.000	1.627.786.840.718
	2018	176.549.143.142	786.034.858.000	1.325.319.567.479
	2019	202.093.734.432	819.436.048.000	1.606.154.645.814
	2020	210.849.923.018	774.098.033.000	1.924.686.760.175

LAMPIRAN 2

LIKELIHOOD RATIO

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.621363	(2,10)	0.0656
Cross-section Chi-square	8.172079	2	0.0168

LAMPIRAN 3

HAUSMAN TEST

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.242725	2	0.0267

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	2.114454	1.020751	0.179717	0.0099
X2	0.795279	1.782799	8.669323	0.7373

LAMPIRAN 4

HASIL LM TEST

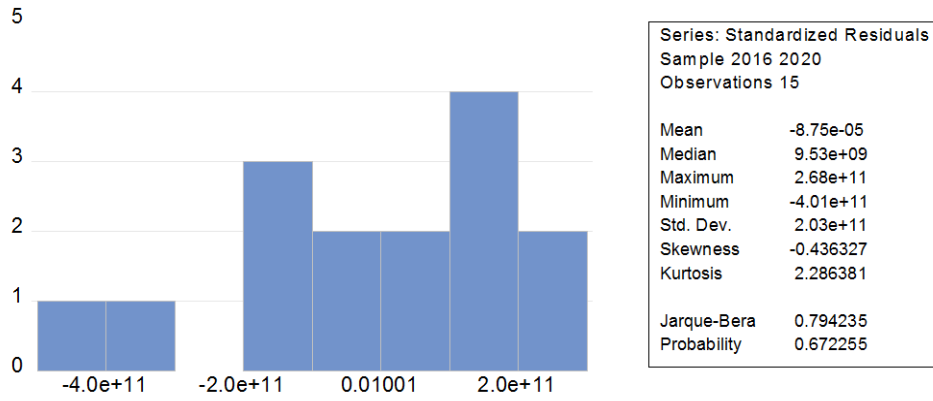
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.878308 (0.1705)	0.108140 (0.7423)	1.986448 (0.1587)
Honda	1.370514 (0.0853)	0.328846 (0.3711)	1.201629 (0.1148)
King-Wu	1.370514 (0.0853)	0.328846 (0.3711)	1.308879 (0.0953)
Standardized Honda	3.167559 (0.0008)	0.559533 (0.2879)	-0.554800 (0.7105)
Standardized King-Wu	3.167559 (0.0008)	0.559533 (0.2879)	-0.206464 (0.5818)
Gourieroux, et al.	--	--	1.986448 (0.1720)

LAMPIRAN 5
HASIL UJI NORMALITAS



LAMPIRAN 6

HASIL MULTIKOLINIERITAS

	X1	X2
X1	1.000000	0.546351
X2	0.546351	1.000000

LAMPIRAN 7

HASIL HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.126844	Prob. F(2,12)	0.8820
Obs*R-squared	0.310544	Prob. Chi-Square(2)	0.8562
Scaled explained SS	0.127833	Prob. Chi-Square(2)	0.9381

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 08/11/22 Time: 14:25
 Sample: 1 15
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.03E+22	7.05E+22	0.288631	0.7778
X1	2.64E+11	5.37E+11	0.491342	0.6320
X2	-3.66E+10	1.01E+11	-0.361223	0.7242

R-squared	0.020703	Mean dependent var	3.85E+22
Adjusted R-squared	-0.142513	S.D. dependent var	4.52E+22
S.E. of regression	4.84E+22	Akaike info criterion	107.4803
Sum squared resid	2.81E+46	Schwarz criterion	107.6219
Log likelihood	-803.1022	Hannan-Quinn criter.	107.4788
F-statistic	0.126844	Durbin-Watson stat	2.588551
Prob(F-statistic)	0.882037		

LAMPIRAN 8

HASIL AUTOKORELASI

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/11/22 Time: 11:19
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.36E+10	3.20E+11	0.198684	0.8458
X1	1.020751	2.439327	0.418456	0.6830
X2	1.782799	0.459276	3.881760	0.0022
R-squared	0.669053	Mean dependent var	1.26E+12	
Adjusted R-squared	0.613895	S.D. dependent var	3.53E+11	
S.E. of regression	2.19E+11	Akaike info criterion	55.24363	
Sum squared resid	5.78E+23	Schwarz criterion	55.38524	
Log likelihood	-411.3272	Hannan-Quinn criter.	55.24212	
F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250	
Prob(F-statistic)	0.001314			

LAMPIRAN 9

HASIL UJI REGRESI DATA PANEL

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/11/22 Time: 11:19
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.36E+10	3.20E+11	0.198684	0.8458
X1	1.020751	2.439327	0.418456	0.6830
X2	1.782799	0.459276	3.881760	0.0022
R-squared	0.669053	Mean dependent var	1.26E+12	
Adjusted R-squared	0.613895	S.D. dependent var	3.53E+11	
S.E. of regression	2.19E+11	Akaike info criterion	55.24363	
Sum squared resid	5.78E+23	Schwarz criterion	55.38524	
Log likelihood	-411.3272	Hannan-Quinn criter.	55.24212	
F-statistic	12.12979	Durbin-Watson stat	1.139250	
Prob(F-statistic)	0.001314			

LAMPIRAN 10

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

Df Untu kpenyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92

LAMPIRAN 11

TABEL T

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.05	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103

28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

Memperhatikan: Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 13 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kesatu : Menetapkan **Dr. Mulyadi, MA** sebagai Pembimbing I dan **Mastura, MEI** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Fahmi Ramadansyah** NIM 4012015168 dengan judul skripsi "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Provinsi Aceh**";

Kedua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 07 Februari 2022 M
06 Rajab 1443 H

DEKAN,


ISKANDAR

Tembusan :

1. Ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/762/In.24/LAB/PP.00.9.01/2023

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Fahmi Ramadansyah

NIM : 4012015168

PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota/ Kabupaten Provinsi Aceh

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 05 Januari 2023

Kepala Laboratorium FEBI


Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701

